



Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

Jl. Kalibata Utara II No. 78 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan 12760, Tlp/ Fax: (021) 7947608.
✉: seknas_fitra@yahoo.com / sekretariat@seknasfitra.org
<http://www.seknasfitra.org> & <http://www.budget-info.com>

Jenis Berkas	Press Release	No. Arsip	PR.11.04/08
Judul	Anggaran Kejaksaan SIMKARI besar tapi info perkara sangat minim.	Tanggal	13 November
Sub Judul Event Terkait		Tahun Penulis	2011 Uchok Sky Khadafi
Kata Kunci	Anggaran Kejaksaan, SIMKARI		

Anggaran Kejaksaan SIMKARI besar tapi info perkara sangat minim.

Kejaksanaan Agung mempunyai sistem informasi yang dikenal dengan SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RI). SIMKARI dikembangkan dimulai sejak tahun 1990an. Dan, saat ini simkari ini diwujudkan dalam sistem Informasi (on line) untuk pelayanan publik. Dengan keberadaan sistem informasi (on line) ini, kejaksaan agung mengharapkan 1). Data perkara yang lengkap dan komprehensif dapat tersedia; 2). Proses administrasi perkara dapat dilaksanakan dengan lebih tertib; 3). Mempermudah proses *monitoring* status perkembangan perkara serta pengawasan atas penanganan perkara; 4). Transparansi lebih meningkat dan akuntabilitas penanganan perkara lebih terjamin; 5). Perencanaan kerja dan proses pengambilan keputusan para pimpinan dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien; dan 6). Jika diinginkan, masyarakat juga dapat memantau perkembangan perkara dengan lebih mudah

Selanjutnya, Untuk penerapan SIMKARI ini, ada Sepuluh Kejaksaan Tinggi yang ditetapkan sebagai lokasi *pilot project* adalah sebagai berikut : Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan. Kemudian, dalam keppres No.26 Tahun 2010 tentang Rincian anggaran belanja Pemerintah Pusat tahun 2011, Kejaksaan agung "tak tanggung-tanggung" mempunyai alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat keras Simkari, dan penunjang operasional Simkari.

Adapun anggaran kejaksaan agung pada tahun 2011 untuk pengadaan perangkat keras Simkari dialokasikan sebesar Rp. 8.4 milyar; pada anggaran tahun 2012 pengadaan perangkat keras simkari sebesar Rp.5.3 milyar; dan pada anggaran tahun 2013, pengadaan perangkat keras simkari sebesar Rp.5.3 milyar. Sedangkan penunjang operasional simkari pada anggaran tahun 2011 sebesar Rp.28 milyar, pada anggaran tahun 2012 sebesar Rp.42 milyar, dan pada anggaran tahun 2013, dialokasikan anggaran penunjang operasional simkari sebesar Rp.44.9 milyar. Dari penjelasan ini, kami dari seknas FITRA mempunyai beberapa catatan sebagai berikut:

1. Kalau ingin melihat perkembangan simkari untuk saat ini, tentu harus buka <http://www.kejaksaan.go.id> dalam sistem informasi (on line) kejaksaan agung ini ternyata belum begitu sempurna. Dimana, walaupun ada simkari, publik memang bisa melakukan pengaduan langsung melalui web site kejaksaan agung. Tetapi, hasil pengaduan dari publik kepada web site atau sistem informasi (on line) tidak ada laporan tindak lanjut dari kejaksaan agung. Ini sangat mengecewakan.
2. Selain itu, publik juga bisa melihat atau mengakses "informasi perkara" dalam sistem informasi on line kejaksaan. Kalau melihat dari lokasi *pilot project* sistem informasi on line kejaksaan seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maka bisa dijelaskan jumlah perkara yang dipublikasikan dengan tabel berikut:

No	Kejati	Pidana Umum	Pidana Khusus
1	Sumut	1050 Kasus	21 Kasus
2	Jatim	9 Kasus	15 Kasus
3	Jabar	1724 Kasus	72 Kasus
4	DKI Jakarta	1763 Kasus	32 Kasus
5	Sulsel	742 Kasus	53 Kasus
6	Kaltim	824 Kasus	67 Kasus
7	Riau	2520 Kasus	67 Kasus
8	Kalsel	547 Kasus	77 Kasus
9	NTT	278 Kasus	26 Kasus
10	sumsel	1591 Kasus	33 Kasus

Sumber seknas FITRA diolah dari web site 10 kejati.

1. Selanjutnya, dari kasus-kasus yang dipublikasi oleh kejaksaan ini kebanyakan kasus tahun 2009 dan 2010 saja. Contohnya, kajati NTT, kasus pidana khusus yang dipublikasi sebanyak 26 kasus, dan untuk kasus tahun 2011 hanya 5 kasus saja, dan selebihnya, 21 kasus dipublikasi di NTT hanya sekitar tahun 2009 dan 2010. Begitu juga, dgn kejati kalimantan selatan, kasus untuk pidana khusus yang dipublikasi hanya 77 kasus, dan hanya sebanyak 5 kasus untuk tahun 2011 yang dipublikasi. Dengan demikian, sistem on line kejaksaan ini tidak up date alias "jadul", dan alokasi anggaran untuk sistem on line hanya pemborosan anggaran, dan tetap saja publik kalau mau melihat info perkara harus ke kantor kejaksaan. Akibatnya, publik sangat dirugikan dan harus mengeluarkan "biaya tambahan" kalau ingin mendapat sebuah informasi perkara ke kantor kejaksaan. Hal ini disebabkan, informasi ini sudah menjadi komoditi yang "diperjual-belikan" oleh "orang-orang" kejaksaan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
2. Dengan demikian, belum sempurna sistem on line kejaksaan ini mengakibatkan anggaran untuk web siten atau simkari ini setiap tahun sangat mahal sekali, dan efeknya untuk meningkatkan pelayanan kepada publik minim sekali.

Dari persoalan diatas, kami minta kepada komisi III agar mengawasi dan mendorong mempercepat proses penerapan sistem informasi on line yang saat ini berjalan sangat lambat sekali. Dan hal ini bisa sangat menghambat reformasi birokrasi di kejaksaan. Padahal anggaran untuk reformasi birokrasi yang disediakan oleh negara untuk kejaksaan ini sangat besar. Lihat saja, selain anggaran penunjang operasional, dan pengadaan perangkat keras simkari, kejaksaan agung juga memperoleh anggaran pengadaan kendaraan tahanan pada anggaran tahun 2011 sebesar Rp.26 milyar, pada anggaran tahun 2012 sebesar Rp.27 milyar, dan pada anggaran tahun 2013 sebesar Rp.292 milyar. dan juga pengadaan kendaraan operasional pada anggaran tahun 2011 sebesar Rp.6.3 milyar, dan pangadaan ambulance kejaksaan pada anggaran tahun 2011 sebesar Rp.250 juta. Dan bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

No	Uraian	2011	2012	2013
1	Penunjang Operasional SIMKARI	28.743.178.000	42.674.397.000	44.935.775.000
2	Pengadaan Perangkat Keras Simkari	8.422.850.000	5.355.225.000	5.355.225.000
3	Pengadaan Kendaraan Tahanan	26.439.600.000	27.784.036.000	292.563.532.000
4	Pengadaan Kendaraan Operasional	6.310.600.000		
5	Pengadaan Ambulance Kejaksaan	250.000.000		

Sumber Seknas FITRA diolah dari Kepres 26 tahun 2010 tentang rincian Anggaran Belanja pemerintah Pusat Tahun anggaran 2011, Lampiran 4d_0060101_005016 dan 4d_0060102_005016

Jakarta.13 November 2011

Uchok Sky Khadafi

Kordinator Invesigasi dan Advokasi FITRA